

**PENGARUH KEEFEKTIVITASAN DAN KONTRIBUSI  
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh:

**Paulina Eka Asyafiyah**

**18.21.0069**

**PROGAM STUDI S1 AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA  
2022**

**PENGARUH KEEFEKTIVITASAN DAN KONTRIBUSI  
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh:

**Paulina Eka Asyafiyah**

**18.21.0069**

**PROGAM STUDI S1 AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA  
2022**



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Paulina Eka Asyafiyah  
NIM : 18.21.0069  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Judul : Telaah Keefektivitasan dan Kontribusi Penerimaan  
Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Karanganyar

Disetujui dan disahkan :

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Mei 2022

Pembimbing,



Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M.

NIDN. 0607098403

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Suharsini, S.E., M.Acc.

NIDN. 0606129102

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Nama** : Paulina Eka Asyafiyah  
**NIM** : 18.21.0069  
**Program Studi** : S1 Akuntansi  
**Judul** : Telaah Keefektivitasan dan Kontribusi Penerimaan  
Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Karanganyar

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

**Pada Hari** : SELASA  
**Tanggal** : 29 NOVEMBER 2022

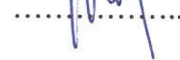
**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua** : Arif Nugroho R., S.E., M.M.



**Anggota** : Dr. Rosita, S.E., M.M., AK., CA.,



**Mengetahui,**

**Ketua STIE Surakarta**



**Dr. Budi Isuyanto, S.E., M.M., M.H.**  
NIDN. 0625127401

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **TELAAH KEEFEKTIVITASAN DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta, 04 Mei 2023

Yang memberi pernyataan



**Paulina Eka Asyafiyah**

## **MOTTO**

"Menuntut ilmu di masa muda bagai mengukir di atas batu."

(Hasan al-Bashri)

"Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu."

(Imam Malik)

“Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan.”

(Dale Carnegie)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu tercinta.
2. Keluarga besar tersayang.
3. Sahabat-sahabat terkasih.
4. Almamater tercinta

**PENGARUH KEEFEKTIVITASAN DAN KONTRIBUSI  
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

Paulina Eka Asyafiyah

18.21.0069

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keefektivitasan dan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah. Teori Ekonomi Pembangunan adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil mengalami kenaikan dalam jangka panjang jika laju pembangunan lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan per kapita riil meningkat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai tahun 2021, tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai tahun 2021, dan tingkat pertumbuhan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai 2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar masih baik dan efektif. Kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai tahun 2021 adalah negative, karena pada tahun 2018 sampai tahun 2021 penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan setiap tahunnya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat karunia-Nya serta hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kemudahan Pembayaran dan Kualitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali) dengan lancar dan baik.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, peneliti banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc. selaku Ketua Prodi Strata 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Bapak Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M selaku dosen pembimbing di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh perhatian , kesabaran dan memberikan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis.
4. Seluruh Dosen dan seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
5. Kedua orang tua, bapak dan ibu terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tulus yang belum dapat penulis balas.
6. Keluarga besar, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Sahabat-sahabatku (Darmastuti Rahma Rabbani, Tifara Az-Zahra, Nabila Hisana Nada, Amalia Nur Wulandari dan teman teman ku SMA yang tidak bisa penulis sebut satu persatu) yang telah membantu serta memberikan motivasi, semangat dan doa untuk penulis.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti selama penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata, selalu ada perpisahan setelah ada pertemuan, namun semoga kesan yang baik selalu ada diantara kita, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Seperti kata pepatah bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari pembaca penelitian ini sangat diharapkan. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Surakarta, 12 Juli 2022

(Paulina Eka Asyafiyah)

## DAFTAR ISI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....               | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....         | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....          | iv   |
| HALAMAN PERNYATAAN.....          | v    |
| MOTTO.....                       | vi   |
| PERSEMBAHAN.....                 | vii  |
| ABSTRAK.....                     | viii |
| KATA PENGANTAR.....              | ix   |
| DAFTAR ISI.....                  | x    |
| DAFTAR TABEL.....                | xii  |
| DAFTAR GAMBAR.....               | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....             | xiv  |
| BAB I : PENDAHULUAN.....         |      |
| A. Latar Belakang .....          | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....          | 4    |
| C. Tujuan Penelitian.....        | 4    |
| D. Manfaat Penelitian.....       | 5    |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....   |      |
| A. Teori Yang Relevan .....      | 6    |
| B. Penelitian Terdahulu .....    | 9    |
| C. Kerangka Berpikir .....       | 15   |
| D. Hipotesis.....                | 15   |
| BAB III : METODE PENELITIAN..... |      |
| A. Objek Penelitian .....        | 18   |
| B. Jenis Penelitian .....        | 18   |
| C. Sumber Data .....             | 18   |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| D. Populasi .....                | 19 |
| E. Sampel .....                  | 19 |
| F. Teknik pengumpulan Data ..... | 21 |
| G. Variabel Penelitian.....      | 21 |
| H. Teknik Analisis Data .....    | 27 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN .....  |    |
| A. Analisis Data .....           | 33 |
| B. Pembahasan .....              | 40 |
| BAB V : PENUTUP .....            |    |
| A. Kesimpulan.....               | 41 |
| B. Saran .....                   | 41 |
| DAFTAR PUSTAKA.....              | 44 |
| LAMPIRAN.....                    |    |

## DAFTAR TABEL

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Laporan penerimaan retribusi parkir kabupaten karanganyar..... | 1  |
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....                                     | 9  |
| Tabel 3.1 Klasifikasi keefektifan.....                                   | 31 |
| Tabel 3.2 Klasifikasi kontribusi.....                                    | 31 |
| Tabel 4.1 Laporan penerimaan retribusi.....                              | 34 |
| Tabel 4.1 Laporan penerimaan PAD.....                                    | 34 |
| Tabel 4.3 Tingkat pertumbuhan realisasi.....                             | 35 |
| Tabel 4.4 Tingkat efektivitas retribusi.....                             | 35 |
| Tabel 4.5 Tingkat kontribusi penerimaan.....                             | 36 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..... | 15 |
|-------------------------------------|----|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Surat Pengantar Dari Kampus.....          | 62 |
| Lampiran 2 Pesan Balasan Dari Dinas Perhubungan..... | 63 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut (Sutedi, 2018) Sistem Pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan asas desentralisasi tersebut, maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah adalah sistem hubungan keuangan pusat dan daerah. untuk mendapatkan sistem hubungan keuangan pusat dan daerah yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan, yang pertama perlu dilihat adalah tujuan ekonomi dan politik dengan adanya sistem tersebut. (Sumodiningrat,

2018:73) Tujuan ekonomi dari sistem keuangan Pusat Daerah adalah terciptanya stabilitasi makro-ekonomi dan tercapainya efisiensi kinerja perekonomian karena dengan otonomi diharapkan pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis karena dilakukan oleh sumberdaya manusia ( *human resources* ) dari daerah itu sendiri yang notabene akan lebih tahu apa yang dibutuhkan daerah tersebut” Dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah diperlukan adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang strategis. Dalam hal ini salah satunya yang terpenting adalah pendapatan yang diperoleh dari pungutan retribusi daerah. Sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah retribusi daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu retribusi daerah harus bisa dikelola dengan profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha untuk meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang strategis, maka pemungutan retribusi daerah ini harus dilakukan secara berkala dan teratur dalam rangka melaksanakan peningkatan pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan (Haerah, 2017). Dari sekian banyak jenis retribusi daerah, yang sangat menarik diteliti khususnya di Kabupaten Karanganyar adalah retribusi parkir. Penelitian ini sangat menarik karena sejumlah alasan sebagai berikut: Kabupaten Karanganyar juga merupakan salah satu kabupaten terpadat penduduk dengan jumlah kendaraan yang cukup besar. Melihat potensi

yang cukup besar tersebut, maka peluang Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir juga terbuka sangat lebar. Sayangnya, hingga saat ini strategi atau upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah khususnya dari sektor retribusi belum dilakukan dengan baik dan maksimal. Padahal jika retribusi ini bisa digali lebih intensif dan dikelola secara lebih baik, tentunya potensi penerimaan retribusi dari sektor ini bisa memberikan kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Karanganyar. Daerah Kabupaten Karanganyar adalah salah satu daerah otonom dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dalam usaha membiayai urusan rumah tangganya memperoleh sumber pendapatan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu sendiri. Sumber pendapatan yang berasal dari pusat adalah bantuanbantuan dan juga hasil perimbangan keuangan pusat dan daerah yang jumlahnya sangat fluktuatif. Oleh sebab itu, keinginan akan selalu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kunci atas sukses dan berjalannya pembangunan sesuai dengan harapan masyarakatnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik serta pengembangan kehidupan demokrasi. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk membuktikan kemampuannya dalam

melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pemerintah dapat membebaskan atau mengenakan pungutan terhadap masyarakat sebagai bukti serta untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang mengenai pungutan tersebut dapat berupa pajak, retribusi dan pungutan lain.

Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar No. 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir menyatakan bahwa retribusi parkir merupakan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dipungut atas pelayanan parkir dilokasi parkir. Parkir merupakan kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang atau barang. Kabupaten Karanganyar terlihat semakin menjamurnya toko-toko swalayan/perbelanjaan, banyaknya *event-event* tertentu yang ada di Karanganyar seperti olahraga, pameran, serta pariwisata. Seluruh aktivitas tersebut tentunya memerlukan sarana transportasi, apabila keberadaan transportasi meningkat diperlukan jalan dan sebuah tempat parkir yang baik, sehingga diharapkan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Tabel 1.1

Laporan penerimaan retribusi parkir kabupaten karanganyar

| Tahun | Jumlah anggaran | Realisasi anggaran |
|-------|-----------------|--------------------|
| 2018  | Rp. 524.112.000 | Rp. 668.710.000    |
| 2019  | Rp. 649.112.000 | Rp. 668.750.000    |
| 2020  | Rp. 454.500.000 | Rp. 477.776.000    |
| 2021  | Rp. 472.500.000 | Rp. 496.200.000    |

Berdasarkan tabel 1.1 terjadi peningkatan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018-2019. Tahun 2018 sebesar Rp. 668.710.000 sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp. 668.750.000, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp. 477.776.000 dan mengalami kenaikan kembali ditahun 2021 menjadi Rp.496.200.000 tetapi kenaikan tersebut masih terbilang rendah dikarenakan masa pemulihan ekonomi saat terjadinya pandemi covid-19.

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam referensi pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan (Debi, 2017) yang penelitian tersebut menyimpulkan bahwa efektivitas pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh (Destika, 2017) yang menyimpulkan bahwa efektivitas pajak parkir tidak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pendapatan asli daerah.

penelitian yang dilakukan oleh (Aprlianti, 2018) menyimpulkan bahwa kontribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian (Rachman, 2021) menyimpulkan bahwa kontribusi parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sentinuwo, 2017) menyimpulkan bahwa retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian (Mufidah, 2017) menyimpulkan bahwa retribusi parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini mencoba untuk melihat adanya pengaruh pajak dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah, yang direfleksikan melalui sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh keefektivitasan dan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karanganyar**

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai tahun 2021.

2. Bagaimana kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai tahun 2021.
3. Bagaimana pertumbuhan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai 2021.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai tahun 2021.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai tahun 2021.
3. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai 2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi bagi banyak pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian untuk menambah wawasan mengenai seberapa efektif dan berkontribusinya masyarakat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan daerah.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah mengoptimalkan pajak dan retribusi yang masuk, menertibkan masyarakat yang wajib dan mempunyai hak dalam berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama penelitian yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil ini juga diharapkan untuk penelitian yang akan datang agar dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian, terutama penelitian yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Grand Theory**

Grand theory pada penelitian ini adalah Ekonomi Pembangunan. Ilmu ekonomi pembangunan merupakan bagian dari ilmu yang khususnya mempelajari tentang kondisi perekonomian yang terjadi pada suatu negara.

Ekonomi Pembangunan adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil mengalami kenaikan dalam jangka panjang jika laju pembangunan lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan per kapita riil meningkat. Pada hakekatnya kajian dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukkan dalam dua golongan. Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun yang bersifat lebih analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara-negara berkembang dan implikasinya untuk membangun ekonomi di kawasan tersebut. Selanjutnya pembahasan mungkin juga bersifat memberikan berbagai pilihan kebijaksanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Menurut Todaro & Smith, menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance), meningkatnya harga diri masyarakat sebagai manusia (self-sistem) dan meningkatnya kemampuan.

Pembangunan ekonomi dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan yang lainnya. Menurut Sadono Sukirno, menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang mempelajari tentang tujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan cara mengatasi masalah, agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya untuk berkembang lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi disini ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita yang mengalami peningkatan. Pendapatan perkapita disini dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat dapat mengalami kesejahteraan dan pertambahan apabila dalam kurun waktu dari tahun-ketahun pendapatan perkapita riilnya suatu daerah mengalami peningkatan. Jadi berdasarkan kedua sifat ini dapat disimpulkan, bahwa analisis ekonomi pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara yang bersangkutan dapat membangun ekonominya menjadi lebih cepat lagi.

## **1. Retribusi**

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk Pemerintah Daerah. Retribusi tersebut merupakan juga sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah. Retribusi mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.

Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, maka tidak dikenakan iuran tersebut.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (Mardiasmo, 2018) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (Windhu, 2018) Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi

kembalinya secara langsung. Menurut (Sudaryo Yoyo, 2017) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikategorikan ke dalam tiga golongan sebagai berikut:

a.) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan usaha. Retribusi jasa umum meliputi:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar.
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

- 10) Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus.
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- 13) Retribusi Palayanan Pendidikan.
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b.) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha dijelaskan sebagai pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh Pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha meliputi:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan.
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan.
- 4) Retribusi Terminal.
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Persanggrahan/Vila.
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

# 10) Retribusi Penyeberangan di Air. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## c.) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik kepada orang pribadi dan badan, yang ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu meliputi:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- 3) Retribusi Izin Gangguan.
- 4) Retribusi Izin Trayek.
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah terus menggalih potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah yang salah satunya Retribusi Daerah. Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar adalah retribusi parkir, retribusi pasar dan retribusi terminal.

## **2. Parkir**

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena di tinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum di larang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecendrungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya.

Menurut (Sukanto, 2018), menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

Menurut (Warpani, 2018), Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Dari pengertian diatas yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan, parkir adalah suatu kendaraan bermotor yang sedang berhenti atau tidak sedang bergerak yang berada dalam suatu ruang atau ditepi jalan umum atau dibahu jalan. Dalam arti lain parkir ini hanya bersifat sementara selama kendaraan sedang ditinggalkan atau sedang ada keperluan lain sehingga memerlukan menepi di bahu jalan untuk berhenti sejenak.

### **a) Retribusi Parkir**

#### **1) Pengertian Retribusi Parkir**

Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Peraturan daerah No. 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa retribusi adalah retribusi parkir ditepi jalan umum yang dipungut atas pelayanan parkir dilokasi parkir.

#### **2) Objek Retribusi Parkir**

Objek retribusi parkir secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan di tempat khusus parkir misalnya di gedung parkir, taman parkir dan atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **3) Subyek Retribusi Parkir**

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir di tempat khusus parkir.

#### 4) Prinsip dan Sasaran

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima.

#### 5) Tarif Retribusi Parkir

a. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk tarif retribusi biasa ditetapkan sebagai berikut:

1. Setiap kendaraan truk dengan gandengan, tronton, container, atau sejenisnya dan bus atau sejenisnya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
2. Setiap kendaraan truk tanpa gandengan, mikro bus atau sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
3. Setiap kendaraan jeep, sedan, station wagon, pick up, atau sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
4. Setiap kendaraan bermotor roda dua atau sejenisnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

b. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk tarif parkir berlangganan ditetapkan selama 1 (satu) tahun sebagai berikut:

1. Untuk setiap kendaraan bus, truk dengan gandengan, mikro bus, atau sejenisnya sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

2. Untuk setiap kendaraan truk tanpa gandengan, mikro bus, atau sejenisnya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Untuk setiap kendaraan jeep, sedan, station wagon, pick up, atau sejenisnya sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah).
4. Setiap kendaraan bermotor roda dua atau sejenisnya sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

#### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan merupakan pos penting dari laporan keuangan dan merupakan suatu tolak ukur atas berhasilnya suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Pendapatan dalam suatu daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode tertentu menjadi hak daerah, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk menggerakkan pembangunan daerah terutama melalui potensi pendapatann asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan pemerintah serta pelayanan kepada

masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini merupakan salah satu indikator dalam tingkat kemajuan suatu daerah setempat. Daerah yang dianggap maju ialah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Karena tingginya PAD yang dapat diterima oleh suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang di suatu daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dilarang untuk melakukan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat kurang mendukungnya pada dunia usaha dan investasi.

Menurut (Halim, 2017) pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah, PAD juga dipisahkan dalam 4 jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Menurut (Mardiasmo, 2018) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan hasil setoran pajak daerah, retribusi daerah dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Sebagaimana yang disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli

Daerah adalah penerimaan pos teripenting disuatu Negara dimana penerimaan PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah serta penerimaan pendapatan yang sah yang sesuai dengan Undangundang yang berlaku.

b. Landasan Hukum Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya sesuai denngan Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Perimbang Keuangan Antara Pusat dan Daerah selanjutnya di sebut PAD, maksud dari PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil penngelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah. Yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang – undang No 28 tahun 2009 yaitu “sumber keuangan daerah yang digali dari wilyah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah”.

c. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a) pendapatan asli daerah yang disingkat PAD, adalah merupakan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- b) dana perimbang,
- c) lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah, ialah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan pada masyarakat, serta pemanfaat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dana perimbang, adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, transparansi, demokratis, dan efisiensi dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, kondisi serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Perimbang merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada kepala daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ialah merupakan pendapatan daerah yang tidak dimasukkan dalam pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan melainkan pendapatan ini terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah bersumber dari pihak lain yang diberikan dengan tidak mengikat dan tidak ada kewajiban bagi daerah

untuk mengembalikannya. Pendapatann dana darurat dalam pengalokasian dana darurat dalam keadaan yang mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam.

d) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain – lain Pendapatan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dalam suatu wilayah yang bersangkutan seperti :

- 1) Pajak Daerah Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa orang pribadi atau badan yang diberikan kepada daerah berdasarkan undang-undang. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian suatu daerah, maka pemerintah daerah terus melakukan pemetaan dalam potensi dan perluasan objek pajak daerah. Meskipun demikian, penetapan tarif dan penarikan pajak dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi memperhatikan potensi daerah, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan pajak oleh pemerintahan daerah.

- 2) Retribusi Daerah Retribusi daerah, adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang secara langsung dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemungutannya juga ditungangkan dalam peraturan daerah.
- 3) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan – badan usaha milik daerah maupun lembaga – lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
- 4) Lain – lain PAD yang sah Lain-lain PAD yang sah, adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## B. Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Penulis<br>dan<br>Tahun | Judul                                                                                                         | Variabel<br>X                                 | Variabel<br>Y                | Alat<br>Analisis | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Daulay<br>(2021)        | Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan | Pajak Parkir Retribusi Parkir Jumlah Penduduk | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kuantitatif      | Tingkat efektivitas pajak parkir pada tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat terbilang cukup efektif, hal ini dibuktikan dengan tingkat toleransi rata-rata melebihi 100%. Namun untuk efektivitas retribusi parkir belum bisa dikatakan efektif, dikarenakan nilai |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>toleransinya kurang dari 80%. Pajak parkir berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah hal ini berarti untuk sektor pajak parkir, memiliki peluang yang cukup besar untuk berkontribusi lebih terhadap PAD.</p> <p>Sedangkan retribusi parkir juga dapat berkontribusi terhadap PAD dibuktikan dengan kenaikannya setiap tahun. Kata kunci: Efektivitas Pajak Parkir, Efektivitas Retribusi Parkir, Efektivitas</p> |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                  |                                                                                                          |                                    |                              |             | Pendapatan Asli Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Handayani (2017) | Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan | Retribusi parkir Kontribusi parkir | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kuantitatif | <p>Pada tahun 2010 dan 2011 dapat dikatakan sangat efektif karena penerimaan retribusi parkir melebihi 100%.</p> <p>Akan tetapi pada tahun 2012 efektivitas retribusi parkir tidak efektif karena berada dibawah 60%. Pada tahun 2013 penerimaan retribusi parkir efektif karena naik menjadi 97,76%.</p> <p>Kontribusi penerimaan retribusi parkir cenderung meningkat.</p> |

|    |                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Ulfa<br>Rabiya,<br>Firman | Analisis<br>Penerapan<br>Potensi dan<br>Efektifitas<br>Pajak Parkir<br>dan<br>Retribusi<br>Parkir<br>Untuk<br>Meningkatk<br>an<br>Pendapatan<br>Asli Daerah<br>Kota<br>Makassar | Analisis<br>Potensi<br>Efektifita<br>s<br>Penerima<br>an<br>Pajak | Pendapat<br>an Asli<br>Daerah<br>(PAD) | Deskrip<br>tif | “Potensi dapat<br>ditambahkan 30% dari<br>realisasi pajak parkir<br>yang diterima oleh<br>BAPENDA<br>sedangkan estimasi<br>jumlah kendaraan<br>bermotor yang parkir<br>tiap harinya yaitu 45%<br>mobil dan 55% motor<br>dengan rata-rata tarif<br>yang digunakan<br>sebesar Rp 3.000-<br>./motor Rp<br>5.000./mobil”. Data<br>pertumbuhan<br>bermotor di Kota<br>Makassar pada tahun<br>2019 yaitu sebanyak<br>1.488.005 unit, ini<br>menandakan bahwa |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>jumlah kendaraan di Kota Makassar berkembang pesat seiring dengan meningkatnya perekonomian di Kota Makassar mulai dari sektor pelayanan jasa maupun sektor perindustrian. Hal ini tentunya berdampak langsung pada penerimaan pajak parkir, oleh karena itu sangat penting bagi pihak Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang menangani pajak daerah termasuk pajak</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

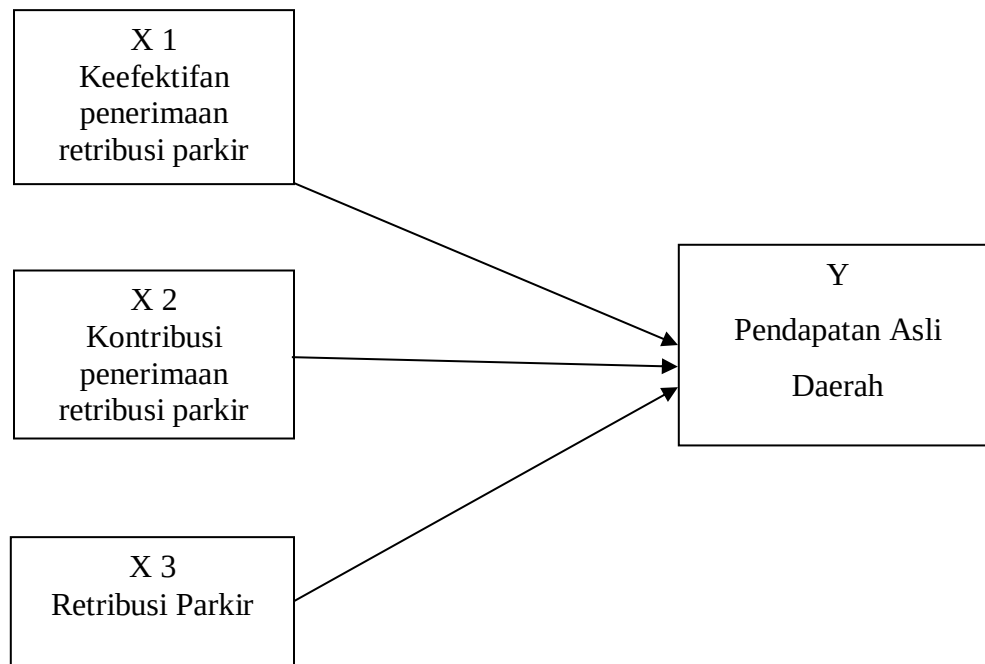
|    |                 |                                                                                                                            |                                                        |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                            |                                                        |                                        |                | <p>parkir untuk lebih memperhatikan dan menggali potensi pajak parkir sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.</p>                                                                                                     |
| 4. | Leki.<br>(2020) | ANALISIS<br>PENGARU<br>H<br>EFEKTIVI<br>TAS<br>PAJAK<br>DAN<br>RETRIBUS<br>I PARKIR<br>TERHADA<br>P<br>PENDAPA<br>TAN ASLI | Efektivit<br>as Pajak<br>Retribusi<br>Pajak<br>Parkir. | Pendapat<br>an Asli<br>Daerah<br>(PAD) | Kualitat<br>if | <p>Studi ini menunjukkan bahwa antara tahun 2013 dan 2017 pembayaran pajak parkir mobil pada dasarnya telah meningkat dengan menaikkan Pajak Penghasilan Daerah Kota Malang dan Peraturan PAD telah meningkat secara substansial tahun lalu</p> |

|    |                   |                                                                                                                                                                            |                                                             |                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | DAERAH<br>KOTA<br>MALANG                                                                                                                                                   |                                                             |                                        |                                       | di Kota Malang pada<br>tahun 2013-2017.<br>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. | Religia<br>(2017) | ANALISIS<br>PENGARU<br>H<br>EFEKTIVI<br>TAS<br>PAJAK<br>DAN<br>RETRIBUS<br>I PARKIR<br>TERHADA<br>P<br>EFEKTIVI<br>TAS<br>PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>KOTA<br>BANDUNG | efektivita<br>s,<br>pajak<br>parkir,<br>retribusi<br>parkir | Pendapat<br>an Asli<br>Daerah<br>(PAD) | Kualitat<br>if dan<br>Kuantit<br>atif | Hasil penelitian<br>menunjukkan bahwa<br>Secara keseluruhan<br>penerimaan pajak<br>parkir Kota Bandung<br>melebihi target yang<br>telah ditetapkan<br>sedangkan penerimaan<br>retribusi parkir tidak<br>dapat mencapai target<br>yang telah ditetapkan.<br>Rasio efektivitas pajak<br>parkir Kota Bandung<br>memiliki rata-rata<br>nilai efektivitas sangat<br>efektif, Rasio<br>efektivitas Retribusi<br>Parkir Kota Bandung |

|  |  |                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | TAHUN<br>2011<br>SAMPAI<br>2013 |  |  |  | memiliki rata-rata nilai efektivitas kurang efektif, dan Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung memiliki rata-rata nilai efektivitas sangat efektif. Tidak terdapat pengaruh secara parsial maupun simultan efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap efektivitas PAD Kota Bandung. |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran menurut (Sugiyono, 2017). merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.



Keterangan:

1. Menurut (Sugiyono, 2017) Variabel independen (variabel bebas atau x) adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat
2. Menurut (Sugiyono, 2017) Variabel dependen (variabel terikat atau y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen atau terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## D. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2017) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Jawaban sementara merupakan jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berikut hipotesis dalam penelitian ini:

- a. Keefektivitasan penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah

Keefektivitasan penerimaan retribusi parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (Debi, 2017) yang penelitian tersebut menyimpulkan bahwa efektivitas pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

**H1 : Keefektivitasan penerimaan retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah**

- b. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah

Penelitian yang dilakukan oleh (Aprlianti, 2018) menyimpulkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

**H2 : Kontribusi penerimaan retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah**

- c. Retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah.

Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar Sutardi menghasilkan kesimpulan bahwa retribusi parkir cenderung meningkat untuk tahun anggaran 2001-2004 dengan rata-rata setiap tahunnya 0,21% terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Hayati, 2016) melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa retribusi parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

**H3 : Retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah**

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang dimana penelitian berupa angka-angka dan menganalisis menggunakan statistik. Jenis

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peneliti berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar tahun 2018 sampai tahun 2021. Tingkat efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar masih baik dan efektif.
2. Kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.
3. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai tahun 2021 adalah negative, karena pada tahun 2018 sampai tahun 2021 penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan setiap tahunnya

#### **B. Saran**

Peneliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar khususnya bagian pengelolaan parkir untuk lebih meningkatkan efektivitas dan kontribusi untuk tahun berikutnya.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar diharapkan lebih tegas dalam pemberian sanksi terhadap juru parkir yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan para petugas parkir dalam menjalankan tugasnya dan membayar retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih. (2018). Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. *Volume 7, Nomor 2*, 162-173.
- Darwin. (2020). Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Ega Marselina. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Faizatullailah Yustica. (2017). Pajak dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*. *Volume 1, Nomor 3*.
- Feisly Kesek. (2018). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado*. *Volume 1, Nomor 4*. 1922-1933.
- Halim, Abdul. (2020). Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta : UPP AMP YKPN Bunga Rampal.
- Made Krisna dan Ni Gusti Putu Wirawati. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. *Volume 5, Nomor 3*. 652-665.
- Mardiasmo. (2020). Perpajakan (Edisi Revisi 2020). Yogyakarta : Andi.
- Mourin M. Mousal. (2019). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado*. *Volume 1 Nomor 4*. 374-382.
- Nariana, Siti Khairani dan Ratna Juwita. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*.
- Nasehudin, Toto Syatori dan Gozali, Nanang. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif (Cetakan Kesatu). Bandung : Pustaka Setia.

- Pekei, Beni. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia.
- Siahaan, M. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.